



RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DIS
KOM
INFO.
MADIUNKOTA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

BAB I **PENDAHULUAN**..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

TAHUN LALU 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Resentra Perangkat Daerah 6

 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 27

 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD 28

 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 41

Bab III **TUJUAN DAN SARANA PERANGKAT DAERAH** 43

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 43

 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 43

 3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan..... 44

Bab IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** 54

Bab V **PENUTUP** 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang dimulai dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan.
- b. penyusunan rencana awal.
 - penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan desember (n-2) dengan berpedoman pada Renstra PD dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.
 - penyempurnaan rencana awal berpedoman pada Surat Edaran Penyempurnaan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah.
- c. penyusunan rencana.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
 - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah
- e. perumusan rencana akhir. dan
- f. penetapan
 - ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
 - s. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025
 - t. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
 - u. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020
 - v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - w. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 tahun 2021
 - x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023
 - y. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022
2. Memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025
3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen rencana sebagai usulan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut :

Penetapan Renja Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023
Kota madiun

Perangkat Daerah :Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Renja Perangkat daerah (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2023)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2.16.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komuniasi dan Informatika						
2.16.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	A	A	A	A	100%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40 Laporan	29 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	95%	95%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang	0	33 orang	33 orang	100%
2.16.01.026	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.026.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 laporan	0	25 laporan	85 laporan	340%
2.16.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	0	100%	100%	100%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Renja Perangkat daerah (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2023)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.16.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	0	1 unit	2 unit	200%
2.16.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Perangkat Daeah	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	0	1 laporan	2 laporan	200%
16.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak digunakan	100%	100%	100%	100%	100%
16.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	62 unit	0	31 unit	31 unit	100%
16.01.209.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	0	3 unit	3 unit	100%
16.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 unit	0	50 unit	72 unit	144%
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi layanan infomasi publik	82%	0	80%	95%	119%
2.16.02.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Komunitas/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %
2.16.02.201.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	24 dokumen	0	12 dokumen	11 dokumen	92%
2.16.02.201.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	24 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Renja Perangkat daerah (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2023)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.16.02.201.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	24 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.16.02.201.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	24 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.16.02.201.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	24 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi	100%	100%	100 %	100 %	100 %
2.16.03.201	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengunas domain.id	100%	100%	100 %	100 %	100 %
2.16.03.201.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.16.03.201.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	164 unit	0	3000 unit	3000 unit	100%
2.16.03.201	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %
2.16.03.201.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Renja Perangkat daerah (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2023)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.16.03.201.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.16.03.202.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20 unit	14 unit	3 unit	6 unit	200%
2.16.03.202.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	6 layanan	2 layanan	2 layanan	4 layanan	200%
2.16.03.202.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.16.03.202.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.16.03.202.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.20.02	Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.20.02.0.21	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3 survey	1 survey	1 survey	2 survey	200%
2.20.02.0.21.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Renja Perangkat daerah (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2023)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaringan Komunikasi Sandi) yang digunakan	4 JKS	0	2 JKS	2 JKS	100%
2.21.02.2.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%
2.21.02.2.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	0	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada telah memenuhi target kinerja yang direncanakan sampai dengan Realisasi Tahun 2022, adapun keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain yaitu :
 - a. Adanya kerja sama yang cukup bagus antar pegawai, antar bidang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
 - b. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan rangkaian kelanjutan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya/ awal RPJMD.
 - c. Adanya anggaran yang mendukung tercapainya keberhasilan dalam pencapaian kinerja.
2. Kebijakan/Tindakan rencana dan penganggaran yang perlu diambil untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain :
 - a. Melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator yang menjadi Tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

Tabel 2.2
 Indikator pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota madiun

NO	Jenis	Uraian		Definisi Operasional	Sumber Data
1	Tujuan	1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik		
2	Sasaran Strategis	1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
		2	Terlaksananya penerapan e-government pada pelayanan publik yang terpadu dan menjangkau masyarakat		
		3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik		
		4	Tersedianya data statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas		
		5	Terlaksananya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi		
3	Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		
		2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
		3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
		4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
		5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		
3	Indikator Tujuan	1	Indeks Domain Layanan SPBE	Merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Kemenpan-RB
		2	Indeks Domain Manajemen SPBE	Merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Kemenpan-RB
4	Indikator Sasaran Strategis	1	Indeks RB Perangkat Daerah	Merupakan hasil penilaian PMPRB Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat	Inspektorat
		2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	

NO	Jenis	Uraian		Definisi Operasional	Sumber Data
		3	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Prov Jawa Timur
		4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	Dinas Kominfo
		5	Indeks Keamanan Informasi	hasil evaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.	Dinas Kominfo
5	Indikator Program	1	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
		2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
		3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
		4	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
6	Indikator LPPD outcome	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Kominfo
				Jumlah layanan publik	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Dinas Kominfo

NO	Jenis	Uraian		Definisi Operasional	Sumber Data
				Jumlah penduduk	
		4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
		5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Kominfo
				Jumlah OPD	
		6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Dinas Kominfo
				Jumlah area penilaian	
		7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Dinas Kominfo
				Raelisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	
		8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	Dinas Kominfo
				Total Jumlah dokumen yang telah di rinci	
7	Indikator LPPD output	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	Dinas Kominfo
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015	Dinas Kominfo
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	

NO	Jenis	Uraian		Definisi Operasional	Sumber Data
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standart	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	Dinas Kominfo
				Jumlah Layanan	
		8	Persentase layananSPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layananSPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Dinas Kominfo
				Jumlah Layanan	
		9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo
				Jumlah Sistem Elektronik	
		10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfo
				Jumlah Layanan publik dan layanan administrasi	
		11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Dinas Kominfo
				Jumlah Data yang dimiliki Pemerintah Daerah	
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Dinas Kominfo
				Jumlah Perangkat Daerah	

NO	Jenis	Uraian		Definisi Operasional	Sumber Data
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo</i> <i>Jumlah ASN pengelola TIK</i>	Dinas Kominfo
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada tidaknya : 1. Dokumen Masterplan 2. Perda tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat GCIO	Dinas Kominfo
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	<i>Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</i> <i>Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota</i>	Dinas Kominfo
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i> <i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</i>	Dinas Kominfo
		20	Persentase diseminasi dan layananinformasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<i>Jumlah diseminasi dan layananinformasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkankabupaten/ kota</i> <i>Jumlah diseminasi dan layananinformasi publik</i>	Dinas Kominfo
		21	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	Dinas Kominfo
		22	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	<i>Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan</i>	Dinas Kominfo
		23	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	<i>Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</i>	Dinas Kominfo
		24	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	<i>Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</i>	Dinas Kominfo
		25	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	<i>Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</i>	Dinas Kominfo
		26	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	<i>Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral</i> <i>Jumlah kegiatan statistik sektoral</i>	Dinas Kominfo
		27	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	<i>Jumlah metadata indikator statistik sektoral</i> <i>Jumlah indikator statistik sektoral</i>	Dinas Kominfo
		28	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah	<i>Jumlah kegiatan strategis teramankan</i> <i>Jumlah kegiatan strategis yang ada</i>	Dinas Kominfo

NO	Jenis	Uraian		Definisi Operasional	Sumber Data
			kegiatan strategis yang harus diamankan		
		29	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	Dinas Kominfo
				Jumlah SE yang ada	
		30	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Dinas Kominfo
				Jumlah SE yang ada	
		31	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	Dinas Kominfo
				Jumlah titik pada PHKS	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	√				2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	3,06 (BAIK)	2,86 (BAIK)	4,45 (MEMUASKAN)	2,90 (BAIK)	
2.	Indeks Domain Layanan SPBE	√				2,80	2,87	2,95	3,10	3,95	3,37	3,67	3,10	
3.	Indeks Domain Manajemen SPBE	√				1,9	1,93	1,97	2,01	2,00	2,18	1,82	2,01	
4.	Indeks RB Perangkat Daerah		√			26.90	27.01	27.07	28.05	29,21	30,29		28.05	
5.	Nilai Sakip PD			√		A	A	A	A	A	A	84,4	A	
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		√			90	91	92	93	97,33	99,25	96,71	93	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik			√		75%	77%	80%	82%	75%	89%	95%	82%	
10.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			√	√	1	1	1	1	1	20	23	1	
12.	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian		√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi			√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				√	72%	73,00%	74%	75%	100%	100%	100%	75%	
15.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program				√	81,88%	81,90%	81,92%	81,95%	81,71%	81,71%	77,60%	81,95%	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota													
16.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,35%	100%	
17.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Persentase perangkat daerah yang memiliki				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	portal dan situs web yang sesuai standar													
21.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik				√	10%	13%	17%	20%	18,7%	78,6%	85,7%	25%	
24.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah				√	80%	82%	84%	86%	100%	85,7%	85,7%	86%	
26.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29.	Persentase data yang dapat berbagi pakai				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pengelolaan Dinas Kominfo													
32.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
33.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
34.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
37.	Tersedianya buku profil daerah				√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
38.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan				√	1	1	1	1	1	7	6	3	
39.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan				√	1	1	1	1	1	20	23	10	
40.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS				√	1	1	1	1	1	7	6	3	
41.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS				√	1	1	1	1	1	20	23	10	
42.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik				√	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
43.	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik				√	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
44.	Tingkat keamanan informasi pemerintah				√	65%	67%	68%	70%	83,56%	96,74%	88%	90%	
45.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding				√	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

No	Uraian Indikator	Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan													
46.	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah				√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
47.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				√	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	
48.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				√	88,50%	88,80%	89,00%	89,50%	100%	100%	89,00%	89,50%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 2.4
Permasalahan dan Hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

No	Permasalahan	Hambatan
1	Belum optimalnya pelaksanaan standart pelayanan informasi publik pada badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun	Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan informasi pada Perangkat Daerah sampai dengan tingkat kelurahan
2	Integrasi sistem informasi dan data antar instansi pemerintahan yang belum maksimal dalam penerapan e-government	Masih terdapat beberapa PD yang menyimpan datanya secara offline yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk kehilangan data dan beberapa data masih disimpan pada server secara internal yang masih memiliki kerentanan data hilang maupun rusak.
		Aplikasi database yang digunakan masih beragam
3	Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral	Belum adanya penetapan tentang standart data, metadata, dan format baku data statistik sektoral
4	Belum optimalnya sistem keamanan informasi	Masih terdapat beberapa PD yang menyimpan datanya secara offline yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk kehilangan data dan beberapa data masih disimpan pada server secara internal yang masih memiliki kerentanan data hilang maupun rusak.

Dampak Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Permasalahan dan hambatan yang ada akan menghambat pencapaian salah satu sasaran Kota Madiun, yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator indeks SPBE. Hal tersebut berhubungan dengan salah satu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan tugas konkuren dalam rangka penyelenggaraan SPBE yang efektif dan efisien.

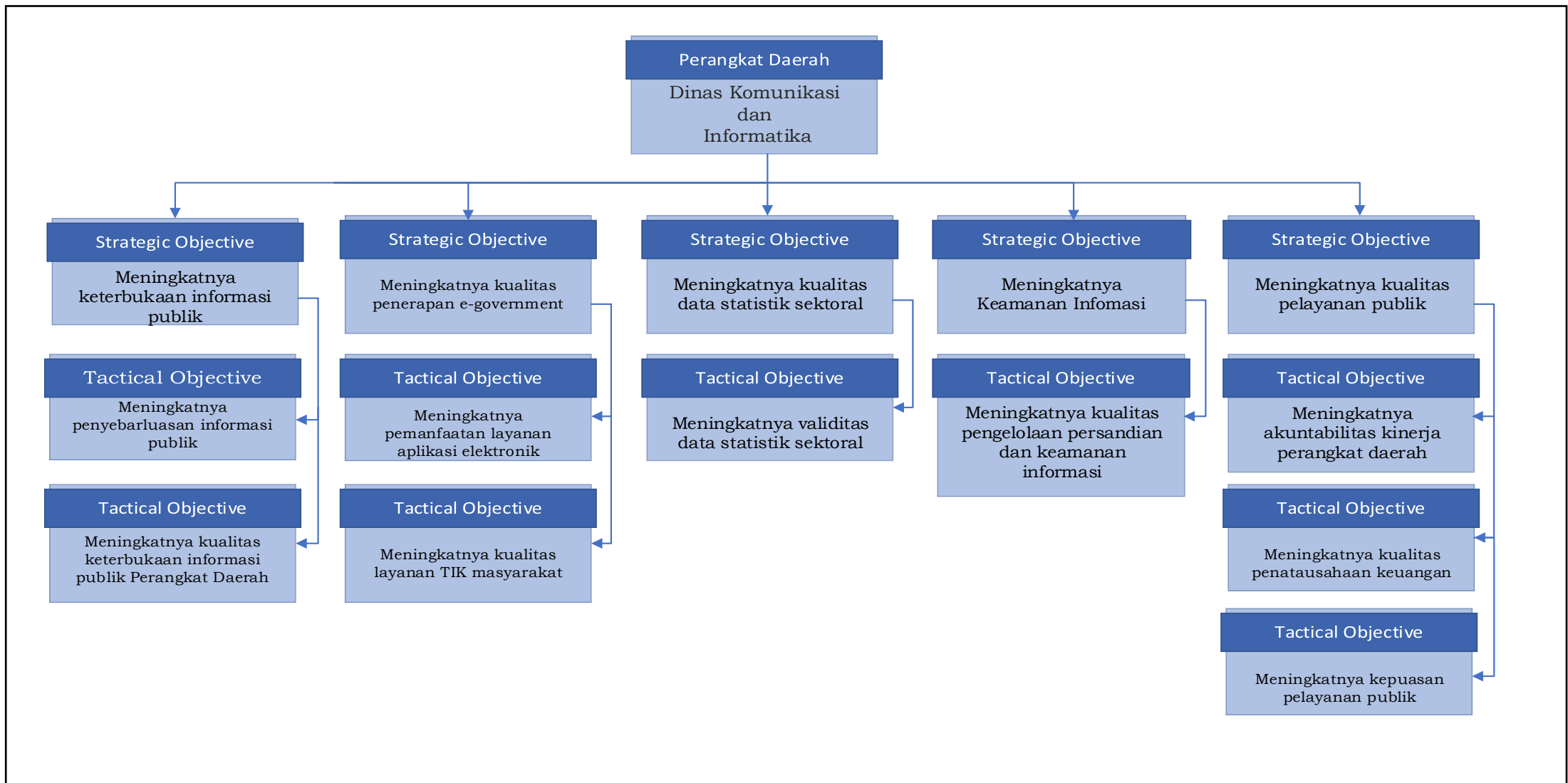
Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat daerah :

Tabel 2.5
Tantangan dan Peluang peningkatan pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota madiun

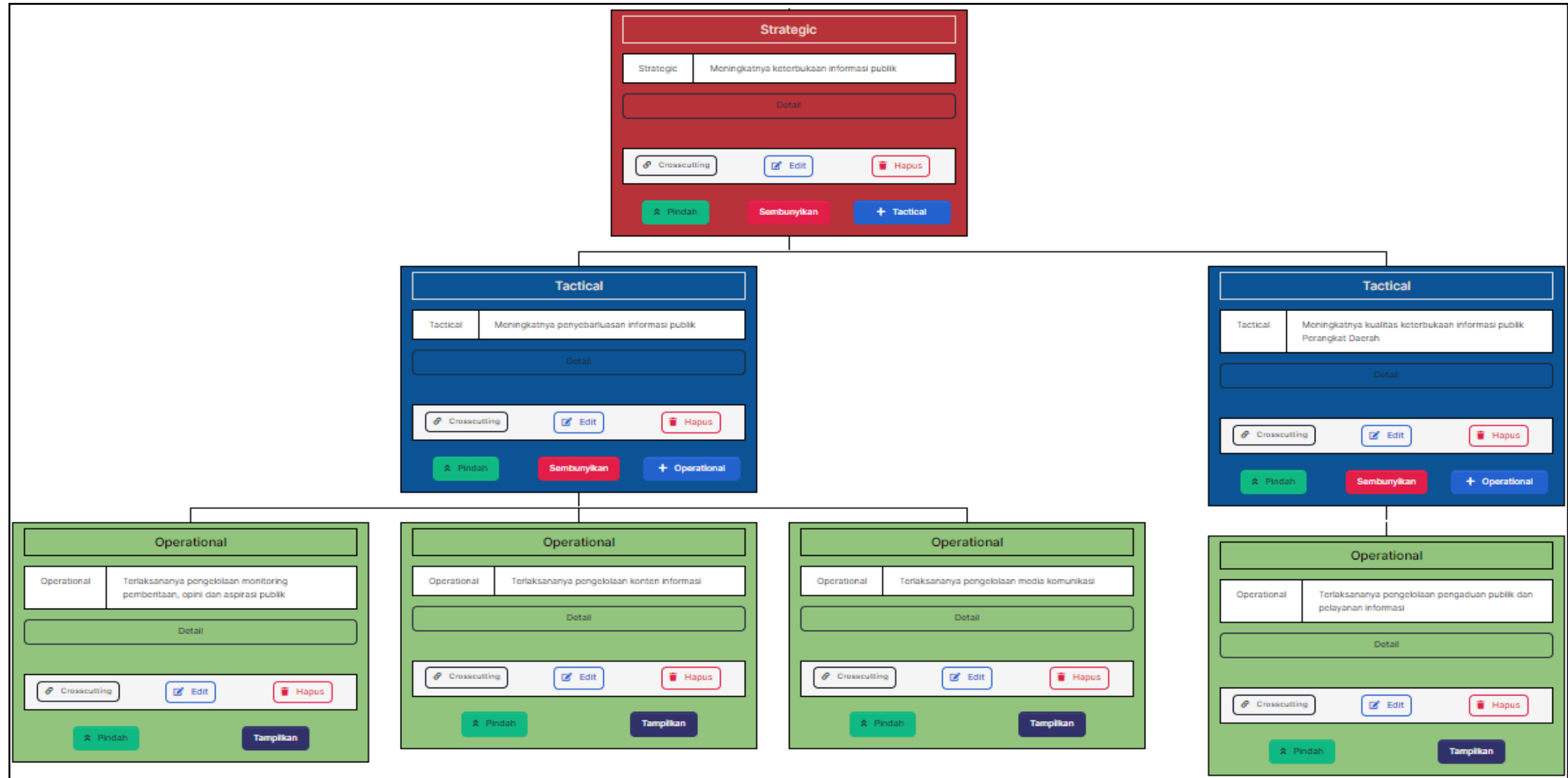
No	Tantangan	Peluang
1	Meningkatkan perkembangan teknologi dan informasi yang ada	Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat
2	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan untuk media publikasi Pemerintah Daerah	Perkembangan pesat media informasi dan komunikasi yang bisa dimanfaatkan
3	Meningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4	Melaksanakan implementasi e Government	Kebutuhan pengembangan e Government

2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD

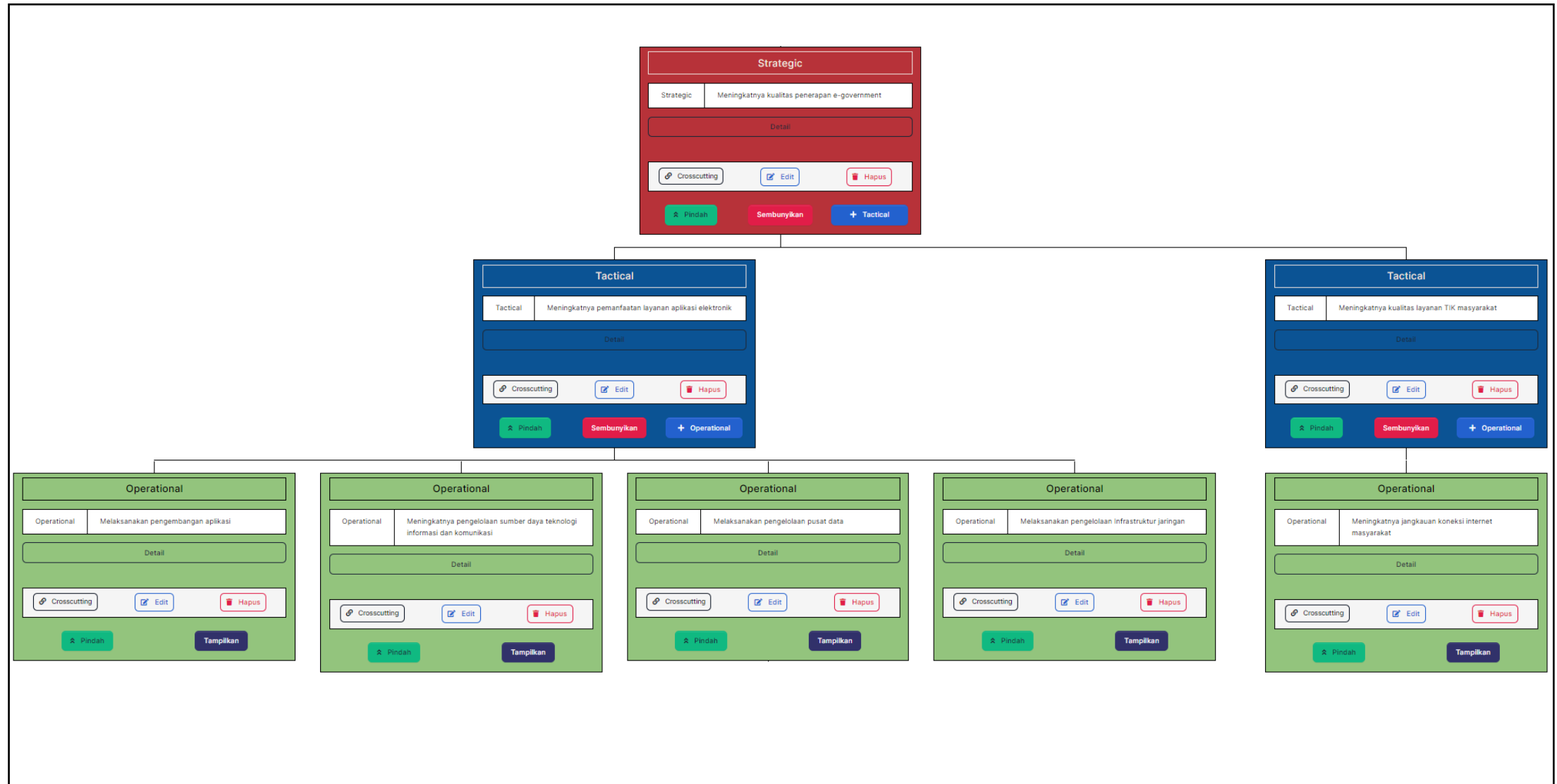
Rencana Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu – isu penting yang telah dibagikan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah.



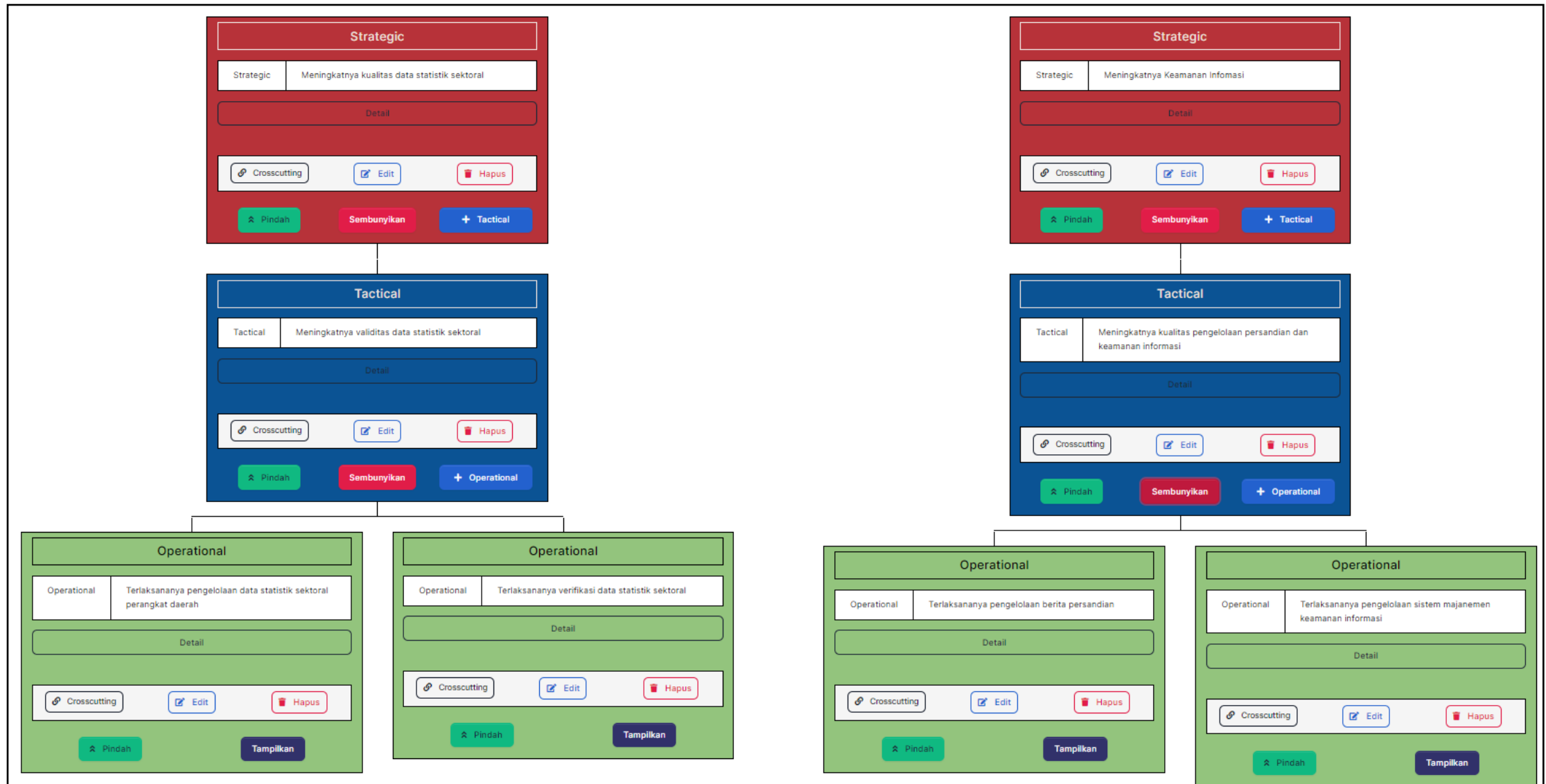
Gambar 2.1
Pohon Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika



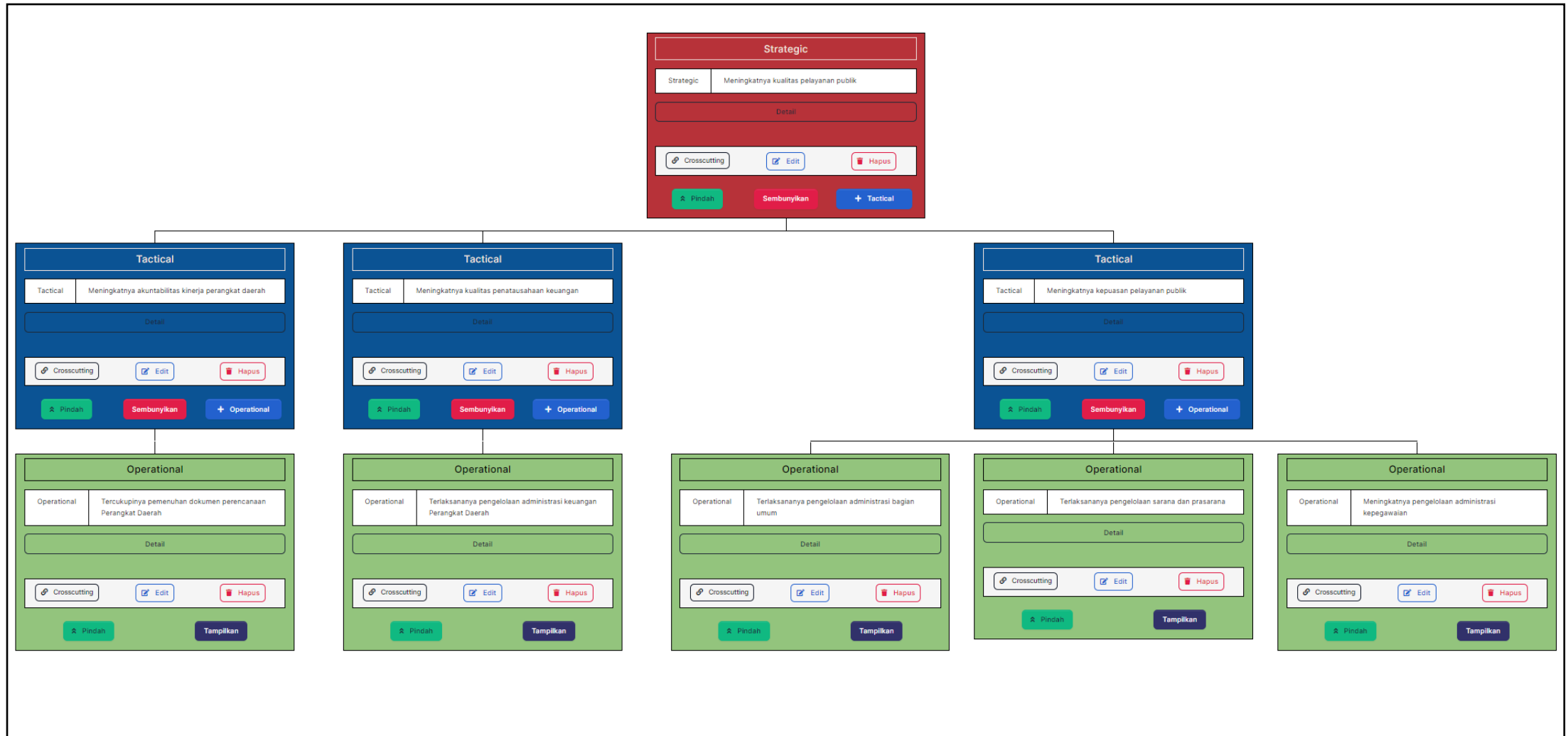
Gambar 2.2
Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik



Gambar 2.3
Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika



Gambar 2.4
Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian



Gambar 2.5
Pohon Kinerja Sekretariat

Tabel 2.6
Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Kode					Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	82,25 Nilai	7.595.074.262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	82,25 Nilai	7.595.074.262
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	65.000.000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	65.000.000
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.600.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.600.000.000
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	5.600.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	5.600.000.000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	400.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	400.000.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	400.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	2.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	2.500.000
2	16	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0
2	16	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.500.000
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	1.125.348.262	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	1.125.348.262
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.125.348.262	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.125.348.262
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	402.226.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	402.226.000
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 kendaraan	252.216.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 kendaraan	252.216.000

Kode						Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	1	2.09	9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	34.660.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	34.660.000
2	16	1	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita s	50 unit	115.350.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	50 unit	115.350.000
2	16	2				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Madiun	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84%	2.836.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Madiun	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84%	2.836.000.000
2	16	2	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	2.836.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	2.836.000.000
2	16	2	2.01	1 4		Relasi Media	Kota Madiun	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan	1.000.000.000	Relasi Media	Kota Madiun	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan	1.000.000.000
2	16	2	2.01	1 5		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Madiun	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 komunitas	200.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Madiun	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 komunitas	200.000.000

Kode						Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	2	2.01	17		Pelayanan Informasi Publik	Kota Madiun	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 permohonan	150.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kota Madiun	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 permohonan	150.000.000
2	16	2	2.01	18		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Madiun	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Madiun	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	25.000.000
2	16	2	2.01	19		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Madiun	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 rekomendasi	10.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Madiun	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 rekomendasi	10.000.000
2	16	2	2.01	21		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Madiun	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Madiun	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1,000,000.00
2	16	2	2.01	23		Penyusunan Konten	Kota Madiun	Jumlah Konten Informasi Publik	120 konten	1.400.000.000	Penyusunan Konten	Kota Madiun	Jumlah Konten Informasi Publik	120 konten	1.400.000.000
2	16	2	2.01	24		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Madiun	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	30 Orang	50.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Madiun	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	30 Orang	50.000.000
2	16	3				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Madiun	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	14.502.890.891	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Madiun	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	14.502.890.891

Kode					Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	197.550.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	197.550.000
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	197.550.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Madiun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	197.550.000
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	14.305.340.891	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	14.305.340.891
2	16	3	2.02	1 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Madiun	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 laporan	97.687.078	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Madiun	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 laporan	97.687.078
2	16	3	2.02	2 0	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Madiun	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	364.696.000	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Madiun	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	364.696.000
2	16	3	2.02	2 1	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 aplikasi	335.400.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 aplikasi	335.400.000

Kode						Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	3	2.02	2	3	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Madiun	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	34 unit	890.697.193	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Madiun	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	34 unit	890.697.193
2	16	3	2.02	2	4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Madiun	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 perangkat daerah	896.180.620	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Madiun	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 perangkat daerah	896.180.620
2	16	3	2.02	30		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kota Madiun	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 perangkat daerah	11.720.680.000	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kota Madiun	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 perangkat daerah	11.720.680.000
2	20	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Madiun	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	125.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Madiun	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	125.000.000
2	20	2	2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	125.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	125.000.000
2	20	2	2.01	8		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 persentase	55.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 persentase	55.000.000
2	20	2	2.01	1	0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Madiun	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Madiun	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	50.000.000

Kode						Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	20	2	2.01	1	1	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Madiun	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Madiun	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	20.000.000
2	21	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Madiun	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	190.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Madiun	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	190.000.000
2	21	2	2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	190.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	100%	190.000.000
2	21	2	2.01	3		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Madiun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	4 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Madiun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	4 Laporan	40.000.000
2	21	2	2.01	4		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	150.000.000

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah tidak ditemukan perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dalam mengakomodir usulan masyarakat hanya menggunakan APBD Kota Madiun.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi :

1. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan PD adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada sasaran kota sesuai RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam sasaran kota yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator indeks SPBE.

Indikator sasaran kota tersebut diturunkan menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik** dengan indikator Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE dan Nilai Indeks Domain Layanan SPBE.

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika disusun juga dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Madiun yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan

- Informatika, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah.
2. Terlaksananya penerapan e-government pada pelayanan publik yang terpadu dan menjangkau masyarakat, disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Madiun yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Madiun yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tersedianya data statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas, disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Madiun yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.
5. Terlaksananya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi, disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Madiun yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi.

3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	√				
	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√				
	1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√				
	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√				
	1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√				
	1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√				
	1.3.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√				
	1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√				
	1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
	1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√				
	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√				
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√				
	1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√				
	1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	√				
	2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√				
	2.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	√				
	2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	√				
	2.1.3 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	√				
	2.1.4 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	√				
	2.1.5 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	√				
	2.1.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	√				
3.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	√				
	3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√				
	3.1.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√				
	3.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	√	√			
	3.2 Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√				

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3.2.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√				
	3.2.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	√				
	3.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	√				
	3.2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	√				
	3.2.5 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	√				
	3.2.6 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	√				
	3.2.7 Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	√				
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	√				
	4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	√				
	4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	√	√			
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	√				
	5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√				
	5.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	√				

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√				

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika maka pada Tahun 2024 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah :

1. Jumlah Usulan :
 - a. Program : 5 Program
 - b. Kegiatan : 11 Kegiatan
 - c. Sub Kegiatan : 28 Sub Kegiatan
 - d. Pagu Anggaran : Rp. 32.542.519.460,00
 - e. Sumber Pendanaan :
 - i. APBD : Rp. 32.542.519.460,00
 - ii. APBN : Rp. 0,00
 - f. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	82,25	Nilai	7.595.074.262	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100	%	65.000.000	
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	65.000.000	
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%	5.600.000.000	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang	5.600.000.000	
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100	%	400.000.000	
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	400.000.000	
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100	%	2.500.000	
2	16	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	Unit	2.500.000	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	1.125.348.262	
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.125.348.262	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100	%	402.226.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	Unit	252.216.000	
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	34.660.000	
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	Unit	115.350.000	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84	%	2.836.000.000	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100	%	2.836.000.000	
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12	Laporan	1.000.000.000	
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4	Komunitas	200.000.000	
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200	Permohonan	150.000.000	
2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	Presentase	25.000.000	
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	Rekomendasi	10.000.000	
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	Media	1.000.000	
2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120	Konten	1.400.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30	Orang	50.000.000	
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	14.502.890.891	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100	%	197.550.000	
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	Dokumen	197.550.000	
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100	%	14.305.340.891	
2	16	3	2.02	15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2	Laporan	97.687.078	
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2	Aplikasi	364.696.000	
2	16	3	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Aplikasi	335.400.000	
2	16	3	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34	Unit	890.697.193	
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34	Perangkat Daerah	896.180.620	
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34	Perangkat Daerah	11.720.680.000	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Dokumen	125.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	Survey	125.000.000	
2	20	2	2.01	8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	Presentase	55.000.000	
2	20	2	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2	Dokumen	50.000.000	
2	20	2	2.01	11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2	Dokumen	20.000.000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100	%	190.000.000	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100	%	190.000.000	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	Laporan	40.000.000	
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34	Perangkat Daerah	150.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusifitas Sosial
4. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mendukung prioritas pembangunan yang ke 1 (satu) yaitu Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City, melalui melalui Program Peningkatan pelayanan publik berbasis digital/IT.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				25,248,965,153.00					27,644,370,138.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25,248,965,153.00					27,644,370,138.00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24,933,965,153.00					27,274,370,138.00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,25 Nilai	82,25 Nilai	7,595,074,262.00				82,75 Nilai	7,502,500,000.00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	65,000,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	65,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Laporan	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	5,600,000,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	5,450,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan	5,600,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Komunikasi dan Informatika	32 Orang/ bulan	5,450,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	400,000,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	350,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	400,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Komunikasi dan Informatika	25 Laporan	350,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2,500,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Unit	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	2,500,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Unit	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	1,125,348,262.00			Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	1,150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,125,348,262.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1,150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	402,226,000.00			-	100 %	482,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	252,216,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	30 Unit	165,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3 Unit	3 Unit	34,660,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	135,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	115,350,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	50 Unit	182,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84 %	84 %	2,836,000,000.00				84 %	3,743,250,000.00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2,836,000,000.00			Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	100 %	3,743,250,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	1,000,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	12 Laporan	1,650,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat										
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	4 Komunitas	200,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	5 Komunitas	250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik										
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	200 Permohonan	150,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	200 Permohonan	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik										
		Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	100 Persentase	25,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	100 Persentase	75,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	10,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	12 Rekomendasi	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	1 Media	1,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	4 Media	1,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten										
		Jumlah Konten Informasi Publik	125000 Konten	120 Konten	1,400,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	125000 Konten	1,441,750,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik										
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	30 Orang	50,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	30 Orang	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	14,502,890,891.00				100 %	16,028,620,138.00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	100 %	197,550,000.00			Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	100 %	197,550,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa										
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		1 Dokumen	197,550,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		197,550,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	100 %	14,305,340,891.00			Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	100 %	15,831,070,138.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		2 Laporan	97,687,078.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		73,700,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah										
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		2 Aplikasi	364,696,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		370,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah										
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		1 Aplikasi	335,400,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		787,370,138.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas										
		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		34 unit	890,697,193.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		850,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		34 Perangkat Daerah	896,180,620.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		1,250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE										
		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		34 Perangkat Daerah	11,720,680,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat		12,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				125,000,000.00					125,000,000.00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	125,000,000.00				1 dokumen	125,000,000.00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	1 Survey	125,000,000.00			Pemerintah Kota Madiun	1 Survey	125,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional										
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	55,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun	100 Persentase	55,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia										
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun	2 Dokumen	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar										
		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun	2 Dokumen	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				190,000,000.00					245,000,000.00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100 %	100 %	190,000,000.00				100 %	245,000,000.00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	100 %	190,000,000.00			Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	100 %	245,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	40,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	4 Laporan	45,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	150,000,000.00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat	34 Perangkat Daerah	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J U M L A H					25,248,965,153.00					27,644,370,138.00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat tujuan, dan sasaran, program dan usulan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan beserta seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Madiun, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN



NOOR AFLAH, S.Kom
Pembina

NIP 197609072003121007